

**KONTESTASI WACANA GOLPUT
PADA MEDIA ISLAM MENJELANG PEMILU 2009**

Analisis Praktik Kewacanaan pada Majalah Sabili dan Risalah Mujahidin Pasca Fatwa Haram Golput Majelis Ulama Indonesia

Denison Wicaksono¹

Abstract

Towards the 2009 National Election of Indonesia, the discourse of the Non-voters or Golongan Putih (often called "Golput") became hot issues in Indonesian mass media. It was then became debate among groups when the Indonesian Ulama Council (MUI) released a fatwa that being non voters is Haram (unlawful). This Fatwa caused controversy among Muslims themselves, since there were support groups and opposed groups in responding this fatwa. This controversy was also accommodated by Islamic media. They have opportunities to construct a discourse through the text which have several tendencies. This study is intended to see and to map out the 2 (two) Islamic medias, Sabili and Risalah Mujahidin in constructing a text after the release of fatwa.

Kata Kunci: *Golput*, media Islam, praktik kewacanaan

¹ Alumnus Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Staf Ahli di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

A. Pendahuluan

Menjelang Pemilihan Umum 2009 (Pemilu 2009), isu golongan putih (Golput) menjadi wacana yang mendapat sorotan media. Kecenderungan peningkatan angka Golput dalam pemilu lalu dan sejumlah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di berbagai daerah membuat wacana ini menjadi topik yang menarik, terlebih setelah Majelis Ulama Indonesia merilis Fatwa yang menyatakan bahwa haram hukumnya bagi muslim yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Fatwa tersebut (selanjutnya disebut fatwa haram Golput) dirilis melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat hari Minggu tanggal 29 Januari 2009. Fatwa ini menimbulkan pro-kontra di kalangan umat muslim sendiri, ada kelompok-kelompok Islam yang mendukung dan ada pula kelompok-kelompok Islam yang tidak mendukung.

Kontroversi ini juga tidak luput dari perhatian media cetak Islam seperti *Sabili* dan *Risalah Mujahidin*. Kedua media tersebut memiliki latar belakang kelompok Islam berbeda. Berdasarkan perspektif konstruktivistik, dapat dipastikan bahwa teks (wacana) yang termuat dalam media tersebut adalah representasi dari ideologi kelompok yang ingin dieksternalisasikan kepada publik, karena media bukanlah sekedar saluran untuk menyampaikan pesan dari komunikator (pengirim pesan) kepada komunikan (penerima pesan), namun media juga merupakan subjek yang

mengkonstruksi realitas. Lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya.²

Sabili adalah majalah yang pada awalnya dilatarbelakangi kelompok gerakan keagamaan kampus (*tarbiyah*) dan berafiliasi dengan organisasi-organisasi serupa seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Pesantren Hidayatullah.³ *Sabili* diterbitkan pertama kali oleh lembaga Kelompok Telaah dan Alamiah Islami (KTAI), sebuah lembaga *tarbiyah* yang berbasis di Universitas Indonesia. Pada tahun 1998, lembaga ini dikembangkan dan diubah namanya menjadi PT Bina Media *Sabili* setelah memiliki Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers.⁴ Meskipun telah diubah namanya, namun jajaran redaksi tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, kelompok di belakang *Sabili* tetap kelompok Islam berbasis *tarbiyah* (pengkaderan) dan berasal dari lingkungan kampus.

Sedangkan *Risalah Mujahidin* adalah majalah berlatarbelakang organisasi Majelis Mujahidin⁵, sebuah organisasi yang bertujuan untuk menegakkan syariah Islam secara *kafaah* (total) dan dan

² Eriyanto (2008) *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS. hal. 22

³ Rijal, Syamsul (2005) *Media and Islamism in Post-New Order Indonesia: The Case of Sabili*, Jurnal Studia Islamika Vol. 12 No. 3. hal. 421

⁴ Sebelumnya, *Sabili* terbit tanpa memiliki SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) dan sempat dibredel oleh rezim orde baru pada tahun 1993.

⁵ Organisasi ini muncul di permukaan terutama ketika Amir (pimpinan) Majelis Mujahidin, Abu Bakar Ba'asyir ditangkap dan dituduh melakukan pelanggaran hukum dan terorisme.

diterapkan di segala bidang (*tathbiqun asy-syariah*). Majelis Mujahidin dibentuk pada tahun 2000 atas dasar tiga pertimbangan, *Pertama*, keinginan mereproduksi sistem *khilafah* (kepemimpinan Islam) yang pernah sukses di masa lalu. *Kedua*, keprihatinan bahwa elit tidak belum menunjukkan orientasi penerapan syariat Islam dan tetap mempertahankan ideologi pancasila yang dianggap sekuler, dan yang *ketiga*, arus globalisasi dan liberalisme telah menggerus mental *Jihad*. Organisasi ini menawarkan Syariat Islam sebagai ideologi alternatif dan liberatif untuk membebaskan umat Islam dan seluruh rakyat dari krisis multidimensional.⁶

Media cetak Islam yang mempunyai latar belakang historis berbeda bisa jadi mempunyai latar belakang ideologi yang berbeda pula. Dalam hal ini *Sabili* dan *Risalah Mujahidin* meskipun sama-sama media Islam dan pada awalnya mereka sama-sama media berbasis komunitas, namun dalam perkembangannya *Sabili* bergeser ke arah industri dan *Risalah Mujahidin* cenderung tetap bertahan pada basis komunitas gerakan sosialnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan terjadi perbedaan pewacanaan antara *Sabili* dan *Risalah Mujahidin* mengenai wacana Golput dalam pemilu 2009, terutama respon media tersebut (dan kelompok

dibelakangnya) mengenai Fatwa Haram Golput dari MUI. Tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana *Sabili* dan *Risalah Mujahidin* sebagai media Islam merespon Fatwa Haram Golput dari MUI melalui konstruksi teks pemberitaannya? Kedua, mengapa *Sabili* dan *Risalah Mujahidin* aktif merespon wacana Golput pasca Fatwa Haram Golput MUI? dan ketiga, apa yang mempengaruhi *Sabili* dan *Risalah Mujahidin* ikut aktif dan merespon Fatwa Haram Golput MUI?

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komparasi pemberitaan media Islam yang berbasis industri dan berbasis komunitas gerakan sosial melalui wacana Golput pasca fatwa MUI.

B. Kerangka Konseptual

Tulisan ini memfokuskan diri pada ranah kontestasi wacana Golput oleh *Sabili* dan *Risalah Mujahidin* pasca Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan umat muslim di Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009 atau Golput. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian dengan metode analisis wacana kritis dari Norman Fairclough.

Berdasarkan metode analisis wacana kritis Fairclough, maka terdapat tiga dimensi analisis yakni mikro, meso dan makro yang merupakan representasi analisis teks, praktik diskursif dan praktik sosio kultural. Adapun untuk

⁶ Zulkarnain, Iskandar (2009) *Arena Kekuasaan Simbolik HTI dan MMI Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Tesis Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada.

mendapatkan data dari masing-masing dimensi analisis itu

dilakukan sebagaimana yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1: Teknik Pengumpulan Data Pada 3 (tiga) Level Analisis

No	Level Masalah	Level Analisis	Teknik Pengumpulan Data
1	Praktik sosiokultural	Makro	Penelusuran Literatur
2	Praktik Wacana	Meso	Depth interview dengan pembuat naskah, atau "Secondary Data" tentang pembuatan naskah
3	Text	Mikro	analisis teks dengan analisis framing (paradigmatif) dari Ibnu Hamad, dengan menganalisis (1) <i>Perlakuan atas Peristiwa</i> , terutama menyangkut perlakuan media dalam mengangkat tema pemberitaan; (2) <i>Strategi pengemasan</i> atau <i>framing</i> , dan (3) terkait dengan simbol ² yang digunakan yakni dengan melihat dua aspek yakni Verbal (kata, istilah, frase) dan Non-verbal (foto, gambar) untuk melihat kecenderungan sebuah teks ingin mengkonstruksi makna seperti apa.

Suatu penelitian dengan analisis wacana kritis akan lebih baik apabila dipusatkan pada suatu wacana tunggal, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada ranah wacana Golput pasca fatwa MUI. Peneliti akan memulai kajian pada ranah wacana Golput menjelang pemilu 2009 hingga MUI ikut terlibat di dalamnya. Kemudian keterlibatan MUI dengan Fatwa-nya menghasilkan kontroversi antara pendukung dan penentang fatwa tersebut. Peneliti bermaksud melihat dan memetakan keterlibatan *Sabili* dan *Risalah Mujahidin* sebagai media Islam dalam praktik pemberitaan tentang wacana Golput pasca keterlibatan MUI. Setelah memetakan posisi dan keterlibatan *Sabili* dan *Risalah Mujahidin*, peneliti menganalisis representasi keterlibatan mereka

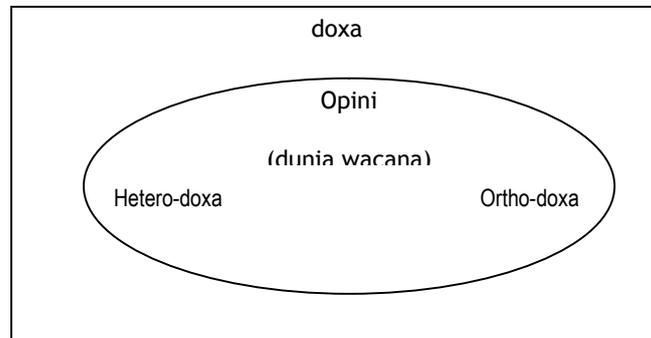
dalam kontestasi wacana Golput dengan pendekatan analisis wacana kritis yang ditawarkan oleh Fairclough, terutama dalam hal apa yang mendasari mereka melakukan konstruksi wacana sebagaimana yang tertulis dalam teks pemberitaannya.

Analisis praktik sosial dibantu dengan teori Praktik dari Bourdieu, karena landasan utama pemikiran penulis adalah kontestasi wacana atau pertarungan wacana untuk memperjuangkan wacana. Sebagaimana teori Bourdieu, praktik sosial (kewacanaan) adalah sebuah praktik dalam suatu ranah untuk memperjuangkan wacana dengan modal-modal dan *habitus* yang dimiliki.

Menurut Bourdieu, wacana dominan (*doxa*) selalu dipertentangkan oleh pendukung

wacana dominan (orthodoxa) dan (heterodoxa) sebagaimana yang penolak wacana dominan digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 1
Ranah Pertarungan Wacana

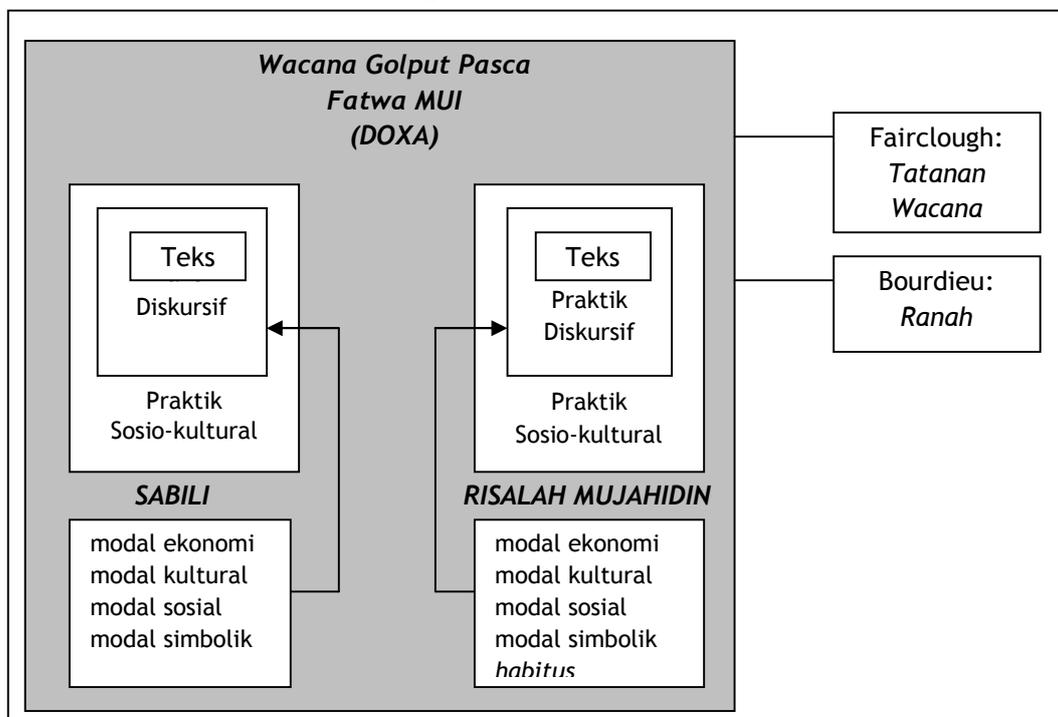


Sumber: Bourdieu, Pierre (1995) *Outline of Theory of Practice*, Cambridge: Cambridge University Press

Titik singgung antara teori praktik Bourdieu dengan analisis wacana kritis Fairclough adalah pada “ranah” sebagai arena perjuangan simbolik yang sepadan

dengan “tatanan wacana” atau *order of discourse*. Sehingga, analisis yang dilakukan adalah sebagaimana yang digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 2
Konseptualisasi Pemikiran



Gambar tersebut mencoba menjelaskan bahwa kedua media memiliki praktik kewacanaan sendiri-sendiri dalam merespon

fatwa haram Golput dari MUI. Untuk itu perlu dianalisis praktik kewacanaan masing-masing media untuk melihat *positioning* mereka terhadap fatwa haram Golput, alasan apa yang mendasari mereka melakukan *positioning*, dan apa yang menyebabkan mereka ber-*positioning* demikian.

Berdasarkan teori praktik, apa yang menyebabkan *positioning* dengan melakukan praktik sosial (kewacanaan) dapat dilihat melalui modal-modal yang dimiliki (modal ekonomi, modal kultural, modal sosial dan modal simbolik) dan *habitus*. Oleh karena itu, penulis memilih konsep teori praktik tersebut sebagai alat analisis.

C. Wacana Golput di Indonesia

Golput merupakan akronim dari “Golongan Putih”. Secara umum, “golput” diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan dan secara sadar untuk tidak mengikuti pemilu karena alasan tidak punya pilihan yang disukai. Atau tetap menggunakan hak pilihnya, namun yang dipilih (dicoblos) adalah bukan pada tanda gambar, namun pada bagian lain di luar tanda gambar yang berwarna putih sehingga menggugurkan suaranya sendiri.⁷ Cara yang terakhir barangkali menjadi asal istilah Golongan Putih, karena memilih bagian putih dari kartu

⁷ Muntoha (2009) *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Haram “Golput” dalam “Timbangan Hukum Islam dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif*, makalah disampaikan pada *Seminar Urgensi Memperkuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, University Club UGM Yogyakarta tanggal 14 Mei 2009. Hal 2

suara. Fenomena tidak berpartisipasi dalam pemilu sebenarnya sudah ada sejak pemilu pertamakali diadakan di Indonesia tahun 1955. Namun istilah Golput pertama kali muncul sebagai gerakan menjelang pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman yang memproklamasikan Golput pada tanggal 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI yang sepenuhnya memberikan dukungan politis terhadap Golkar. Arogansi ini ditunjukkan dengan pemaksaan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan pada Golkar. Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi Golput dengan cara tetap mendatangi TPS. Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicobloskan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih, tidak mencoblos pada tanda gambar partai, agar suara menjadi tidak sah.⁸ Menurut Arbi Sanit, Golput lebih merupakan gerakan kultural sebagai upaya untuk menegakkan suatu tradisi/kultur cara bermasyarakat yang sehat (Sanit, 1992)

Sebenarnya angka Golput di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Kuwait, Italia,

⁸ Gumay, Hadar Navis (2008) *Tekan Golput, Pemilih Harus Dipermudah*, Media Indonesia vol 5:2 Senin 4 Agustus 2008. hlm 3

Amerika Serikat dan Malawi yang persentase golputnya mencapai 60% (Asfar, 2004). Di Indonesia, persentase angka golput tiap pemilu tidak sampai 12% (kecuali pemilu 2004). Angka ini hanya bisa disamai oleh negara-negara yang mewajibkan untuk memilih dalam pemilu.

Meskipun demikian, keberadaan Golput dipandang cukup merisaukan oleh pemerintah, karena fenomena Golput yang

ditafsirkan sebagai: *Pertama*, tindakan tidak memilih sebagai representasi ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau rezim yang ada, dan *Kedua*, melihat kecenderungan turunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan sejumlah Pilkada sehingga mendorong naiknya angka golput. Menurut data yang dihimpun penulis, pasang surut angka Golput pada setiap pemilu adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Presentase Golput Pemilu Legislatif 1955-2004⁹

Pemilu	Terdaftar	Suara Sah	Tidak Hadir	GOLPUT	Persentase Golput (%)	Naik/Turun (%)
1955	43.104.464	37.785.299	5.319.165	5.319.165	12.34	
1971	58.556.776	54.669.509	3.479.696	3.889.267	6.67	- 5.67
1977	69.871.092	63.998.344	6.380.406	5.872.748	8.40	+ 1.73
1982	82.134.195	75.126.306	6.502.944	7.007.889	9.61	+ 1.21
1987	93.737.633	85.869.816	8.156.137	7.867.817	8.39	- 0.22
1992	107.565.697	97.789.534	9.776.163	9.776.163	9.05	+ 0.26
1997	124.740.987	112.991.150	11.749.837	11.749.837	10.07	+ 1.02
1999	117.815.053	105.786.661	12.028.392	12.028.392	10.04	+ 0.34
2004	148.000.369	113.462.414	23.580.030	34.537.955	23.34	+ 13.30

⁹ Asfar, Muhammad (2004) *op.cit.* Hal. 5

Tabel 3
Hasil Pilpres 2004

P U T A R A N	Jumlah Pemilih	Pemilih Terdaftar				Suara Sah		Suara tidak Sah		Golput	
		menggunakan hak pilih		tidak menggunakan hak pilih		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
		Jumlah	%	Jumlah	%						
I	155.048.803	121.293.844	78.23	33.754.959	21.77	118.656.868	97.83	2.636.976	1.7	36.391.935	23.47
II	153.312.436	116.662.705	76.1	36.649.731	23.9	114.257.054	97.9	2.405.651	2.1	39.055.382	25.47

Sumber: Berdasarkan SK KPU No. 79/SK/KPU/2004 dan SK KPU No. 98/SK/KPU/2004

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dengan responden yang tersebar di seluruh Indonesia, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu dan Pilkada merupakan implikasi dari beberapa gejala berikut ini.¹⁰*Pertama*, sikap apatisme masyarakat dan delegitimasi terhadap Parpol akibat kinerja yang kurang berorientasi pada pelayanan publik. *Kedua*, kualitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belum bisa ditingkatkan. *Ketiga*, adanya kejenuhan di masyarakat akibat seringnya frekuensi Pemilu (pilkada), *Keempat*, berkembangnya persepsi bahwa Pemilu itu antara hak dan kewajiban.

Peningkatan angka Golput menjelang pemilu 2009 sudah diprediksikan sebelumnya melalui penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Diantaranya adalah hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survei Indobarometer pada Desember 2008

menunjukkan masyarakat yang merasa terdaftar sebagai pemilih hanya 67,2 persen. Sisanya 18,3 persen menjawab tidak, dan sisanya 14,5 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Artinya, dari 172 juta pemilih terdaftar, hanya 115,8 juta yang merasa terdaftar, 31,48 juta yang tidak merasa terdaftar dan 24,94 juta tidak tahu apakah namanya terdaftar sebagai pemilih atau tidak.¹¹ Banyaknya angka ketidaktahuan pemilih mengenai kepesertaannya dalam Pemilu dalam survei ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan angka Golput akan tinggi.

Setidaknya ada tiga alasan yang menjadi kekhawatiran peningkatan angka Golput pada pemilu 2009. *Pertama* adalah alasan politis, karena masyarakat kecewa dengan kinerja pemerintah. Pemilu terbukti tidak pernah menghasikan pemimpin yang mau dan mampu melakukan perubahan yang memihak rakyat. *Kedua*, alasan administrasi, proses penyusunan

¹⁰ Jurnal Dialog Kebijakan Publik Edisi 4/Desember/Tahun II/2008. Hal. 44-54

¹¹ Kompas, 12 Januari 2009 dan <http://kanalpemilu.net/?q=node/80> diakses Sabtu, 19 Desember 2009 Jam 07:18 WIB

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kurang baik mengakibatkan ada sebagian masyarakat menjadi tidak tercantum sebagai pemilih. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri bagi muslim yang namanya tidak tercantum, karena fatwa mewajibkan memilih, sedangkan dia tidak terdaftar hak pilihnya. Dan yang *ketiga*, alasan ideologis. Hal ini terutama berlaku pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok yang beranggapan bahwa Indonesia berada dibawah demokrasi sekuler, adalah negara jahiliyah yang menolak berlakunya syariat Islam.¹²

Sebagai reaksi atas kekhawatiran meningkatnya angka Golput pada Pemilu 2009, Ketua MPR yang sekaligus kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan pernyataan bahwa Golput adalah perbuatan setan.¹³ Menurut Hidayat, Allah melarang melakukan perbuatan setan, sehingga diharapkan masyarakat jangan sampai Golput. Golput, lanjut Hidayat, adalah perbuatan yang sia-sia karena untuk menjalankan roda pemerintahan dibutuhkan pemimpin yang dipilih melalui pemilu, apabila tidak memilih negara akan rugi besar.

¹² Lihat: Artikel *Bisakah Fatwa Haram Hentikan Golput* dalam Risalah Mujahidin Edisi 27 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009M. Hal 18-19

¹³ Lihat *Hidayat : Golput Perbuatan Setan*, <http://www.inilah.com/berita/politik/2009/03/24/93319/hidayat-golputperbuatan-setan/> Diakses Minggu, 27 September 2009 jam 23.00 WIB

Hidayat juga merupakan tokoh yang paling vokal medesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengeluarkan fatwa haram Golput, agar umat Islam di Indonesia menggunakan hak pilih secara benar, sebab jika umat Islam Golput, maka akan menguntungkan pihak non-muslim, karena kesempatan mereka untuk merebut kekuasaan menjadi semakin terbuka.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama dengan kata lain, lembaga MUI didirikan untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Tujuan didirikan lembaga MUI adalah sebagai pewaris tugas-tugas Nabi (*Warasatul Anbiya*), pemberi fatwa (*mufti*), pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*), gerakan *Islah wa al tajdid* dan penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁴

Diantara tugas-tugas tersebut, tugas yang berupa "produk" dari MUI adalah sebagai *Mufti* atau pemberi Fatwa.¹⁵ Dalam mengeluarkan Fatwa, MUI tidak serta merta mem-fatwakan suatu

¹⁴ <http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekilas-tentang-kami> diakses tanggal 19 Desember 2009 jam 07:42 WIB

¹⁵ Menurut kamus Bahasa Indonesia, fatwa berarti nasihat; pelajaran; penjelasan mengenai hukum Islam.

hal tanpa ada wacana publik yang berkembang. Untuk kasus Pemilu 2009 yang dianggap sebagai masalah yang krusial terutama dalam kaitannya dengan pemilihan figur pemimpin, MUI juga memberikan fatwa dalam menentukan kriteria-kriteria calon pemimpin yang layak dipilih. Ditegaskan dalam fatwa ini bahwa dalam memilih pemimpin, umat Islam wajib memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*shidiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Apabila tidak memilih calon pemimpin dengan kriteria tersebut atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat, maka hukumnya adalah haram.

Dalam fatwa tersebut, memang tidak disebutkan istilah "Golput" atau "Golongan Putih". Sehingga terkesan bahwa fatwa ini bukan tentang Golput, tapi fatwa tentang memilih pemimpin yang baik. Namun di level masyarakat, fatwa ini lebih populer dengan sebutan Fatwa Haram Golput karena fatwa ini juga mengatur mengenai hukum tidak ikut berpartisipasi (memilih) dalam pemilu, yakni hukumnya haram.

Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan dalil QS Annisa: 59 yang berbunyi: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika*

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."¹⁶

Fatwa ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam sendiri, ada kelompok Islam yang mendukung fatwa haram Golput, ada pula yang menolak fatwa tersebut. Berikutnya akan dijabarkan bagaimana media Islam (mewakili kelompok dibelakangnya) mengkonstruksi wacana tentang Golput melalui teks pemberitaannya, yang kemudian dapat dilihat posisi mereka (media dan kelompok dibelakangnya) ikut mendukung fatwa haram Golput atau menolak fatwa haram Golput.

D. Modal dan *Habitus* Media Islam dalam melakukan Praktik Kewacanaan

Dalam perspektif praktik kewacanaan Bourdieu, *Sabli* berada di posisi pendukung Fatwa Haram Golput (*orthodoxa*) yang bertugas melestarikan wacana dominan (*doxa*) yang merupakan wacana produksi dari MUI berupa fatwa, yakni wacana bahwa Golput hukumnya haram. Sedangkan *Risalah Mujahidin* ada di posisi menentang Fatwa Haram Golput (*heterodoxa*) yang menentang atau melawan wacana dominan dengan menggunakan wacananya sendiri.

¹⁶ Awwas, Irfan S (2009) *Fatwa Haram Mengakali Golput*. Risalah Mujahidin Th III Edisi 27 Rabiul Awwal 1430H/Februari-Maret 2009M. hal. 12-13, dan *Fatwa Haram MUI mengapa Ditertawakan?* http://talithazone.blogspot.com/2009/02/fatwa-haram-golput-mui-kenapa_26.html Diakses Sabtu, 19 Desember 2009

Praktik kewacanaan yang dilakukan kedua media tersebut tidak terlepas dari *habitus* dan modal-modal yang dimiliki oleh kedua media tersebut. Karena sebagaimana teori praktik Bourdieu, praktik sosial dalam suatu ranah juga merupakan akumulasi modal (ekonomi, sosial, kultural, simbolik) dan *habitus*.

Dalam hal modal ekonomi, *Sabili* jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan *Risalah Mujahidin*. Sebab *Sabili* merupakan media yang berbasis industri dan *Risalah Mujahidin* meskipun menggunakan tata cara industri dalam operasionalisasinya, merupakan media yang berbasis komunitas dan jumlah tirus penjualannya pun berbeda jauh dengan *Sabili*.

Kemudian dalam hal modal sosial, *Sabili* berusaha mencakup semua kelompok Islam meskipun *Sabili* pada awalnya adalah "corong" bagi gerakan Tarbiyah yang kini aktivisnya banyak bergabung menjadi politisi, terutama untuk PKS. Karena ada kesamaan genealogis dan historis, maka menjadi wajar apabila ada kedekatan antara *Sabili* dengan PKS. Hal ini dapat terlihat pada edisi menjelang pemilu legislatif, halaman pertama *Sabili* setelah halaman cover selalu iklan PKS, dan di *Sabili* tidak ada partai lain yang beriklan selain PKS. Selain itu berkaitan dengan persebarannya, *Sabili* sudah bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penjualan yang mencapai ratusan

ribu *copy*. Sedangkan pada *Risalah Mujahidin*, tidak ada lembaga atau organisasi lain yang dekat selain Majelis Mujahidin, walaupun ada lembaga tersebut adalah Yayasan Ahlu Suffah dan Pusat Studi Islam An Nabawy yang merupakan bagian dari Majelis Mujahidin. Karena itu pula distribusi *Risalah Mujahidin* selalu memanfaatkan jaringan perwakilan Majelis Mujahidin di beberapa kota di Indonesia dengan penjualan yang (hanya) ribuan *copy* per edisi, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan *Sabili* dan persebarannya pun tidak seluas *Sabili*.

Dalam hal modal kultural, *Sabili* dilatarbelakangi orang-orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai pengalaman yang memumpuni di bidang jurnalistik pengelolaannya pun dilaksanakan secara profesional, sehingga *Sabili* bisa bertahan sebagai media Islam juga karena pengalaman dan kontribusi orang-orang yang berada di balik media tersebut. Sedangkan *Risalah Mujahidin* dilatarbelakangi orang-orang dari Majelis Mujahidin yang cukup produktif menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mendukung penegakan syariat Islam, namun pengelolaan medianya kurang profesional, sehingga colaps dan berhenti terbit untuk sementara.

Kemudian dalam hal modal simbolik, *Sabili* mendapatkan modal simboliknya dari dari akumulasi modal ekonomi, modal sosial dan modal kulturalnya sendiri. Terlebih dengan jaringan penjualan yang

luas dan memiliki pembaca setia dari kalangan PKS. Konstruksi wacana yang dibangun pun berusaha untuk bisa melingkupi semua golongan dan kelompok Islam. Hal tersebut dilakukan agar *Sabili* mempunyai modal simbolik dan bisa di-*convert* menjadi kekuasaan simbolik untuk mengkonstruksi wacana dan disetujui oleh para pembacanya. Menjelang pemilu, *Sabili* mengkonstruksi teks pemberitaan yang mendukung fatwa haram Golput, dan pembaca diberi “penyadaran” bahwa ikut berpartisipasi dalam pemilu itu baik manfaatnya bagi umat Islam. Hal tersebut dilakukan agar supaya PKS bisa memasang iklan di *Sabili* sekaligus menjadi media promosi PKS. Apalagi pembaca *Sabili* sangat luas dan meskipun kebanyakan pembacanya adalah pendukung PKS tapi ada juga yang “belum” menjadi pendukung PKS, oleh karena itu *Sabili* juga berusaha merangkul berbagai kelompok-kelompok Islam supaya ikut mendukung partai Islam (PKS).

Berbeda dengan *Sabili*, *Risalah Mujahidin* memiliki segmen pembaca dari kalangan anggota dan simpatisan Majelis Mujahidin. *Risalah Mujahidin* diedarkan melalui jaringan Majelis Mujahidin sehingga secara modal sosial persebarannya cenderung terbatas. Oleh karena itu, modal simbolik untuk memiliki kekuasaan simbolik yang akan digunakan untuk berkontestasi dalam ranah wacana Golput pun menjadi terbatas pula. Sehingga *Risalah Mujahidin* yang berposisi sebagai *hetero-doxa* kurang bisa

memperebutkan wacana dominan, terlebih *Risalah Mujahidin* mengalami krisis finansial dan pada akhirnya *colaps*.

Dari segi habitus, *Sabili* dapat digolongkan sebagai Media Islam yang berbasis industri atau “media yang berdakwah”, karena keberadaan *Sabili* memang menjadi lahan bisnis. Sedangkan pada *Risalah Mujahidin* dapat digolongkan sebagai Media yang menjadi sarana berdakwah atau “dakwah bermedia”, karena pada dasarnya *Risalah Mujahidin* diposisikan sebagai media perjuangan bagi Majelis Mujahidin untuk menegakkan syariat Islam.

E. Praktik Kewacaanaan *Sabili* dalam Ranah Wacana Golput pasca Fatwa MUI

E.1. Deskripsi (analisis teks)

Hasil analisis teks yang menunjukkan bahwa kecenderungan *Sabili* menempati posisi *ortho-doxa* dalam ranah wacana Golput apabila dihubungkan dengan kombinasi *habitus* dengan modal yang dimiliki *Sabili*, maka akan ditemukan fakta bahwa *Sabili* sebagai media Islam tidak bisa lepas dari posisi *Sabili* sebagai media Islam berbasis Industri dan ikatan secara simbolik dengan PKS.

Penulis ingin menampilkan keseluruhan dari hasil analisis teks, namun karena keterbatasan tempat dan menghindari paper ini menjadi terlalu panjang, maka untuk setiap kecenderungan konstruksi wacana hanya dicontohkan salah satu teks pemberitaannya saja.

E.1.1. Golput Harus Dihindari, Karena Mempermudah Kaum Non-Islam untuk Berkuasa

Apabila umat Islam Golput, maka musuh-musuh Islam bisa lebih mudah menguasai posisi-posisi strategis dalam struktur baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Untuk itu umat Islam sebaiknya tidak Golput supaya bisa menghambat kaum Kuffar untuk bisa menguasai posisi-posisi strategis dalam struktur. Hal ini tersurat dalam hampir semua teks pemberitaan yang berkaitan dengan wacana Golput.

Karena keterbatasan tempat, penulis hanya akan mencontohkan salah satu teks pemberitaan saja dalam tulisan ini, yakni teks pemberitaan yang berjudul *Strategi Kaum Khuffar untuk Menguasai Pemilu 2009* yang dimuat dalam *Sabili* No. 20/XVI/23 April 2009/27 Rabiul Akhir 1430H pada halaman 30-35. Teks pemberitaan ini menyoroti mengenai skenario kaum non-muslim dalam menghadapi pemilu 2009, bahwa kaum non-muslim berkeinginan untuk menguasai pemilu 2009 dan menyingkirkan kaum muslim. Sehingga kaum muslim harus waspada karena apabila kaum non-muslim berhasil mengelabui umat Islam, salah satunya dengan menghembuskan isu Golput, mereka bisa menduduki posisi-posisi yang penting dalam struktur dan dapat dengan mudah menyingkirkan umat Islam. Secara umum, teks ini bermaksud menegaskan bahwa kewaspadaan

umat Islam harus ditingkatkan, karena apabila umat Islam lengah dan lebih memilih Golput, maka akan menguntungkan kaum non-muslim.

Konstruksi wacana mengenai Golput yang harus dihindari ini juga termuat dalam teks pemberitaan lain yang berjudul *Golput Skenario Non-Islam* dalam *Sabili* No. 20/XVI/23 April 2009/27 Rabiul Akhir 1430H (halaman 49) dan *Proyek Daud 2009* dalam *Sabili* Edisi No.21/XVI/7 Mei 2009/12Jumadil Awal 1430H(halaman20-21).

E.1.2. Upaya Penegakan syariat Islam melalui Jalur Parlemen perlu Didukung

Sabili juga mengajak pembacanya untuk mendukung penegakan syariat Islam melalui Jalur Parlemen dengan mendukung para politisi muslim menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Sebagaimana yang tersurat dalam teks pemberitaan berjudul *Bersatu Demi Syariat* yang dimuat dalam *Sabili* No. 20/XVI/23 April 2009/27 Rabiul Akhir 1430H di halaman 40-43.

Teks ini mengungkapkan bahwa ada dua kelompok dalam upaya penegakan syariat Islam, ada yang mendukung demokrasi dan yang menolak demokrasi secara total. Jalan tengah yang dipertemukan dalam teks ini adalah dengan memberikan ruang negosiasi bagi masing-masing kelompok untuk saling mendukung dan tidak berbuat saling

mengkafirkan, karena sesungguhnya tegaknya syariah adalah tujuan dan cita-cita bersama. Perihal perbedaan strategi sebaiknya tidak perlu saling dipertentangkan dan jangan sampai ada kedengkian diantara umat muslim, karena sikap ego yang membuat tercerai berai hanya mengundang murka Allah. Teks tersebut bermaksud mendamaikan perbedaan strategi penegakan syariat yang terbagi dalam dua kelompok, agar umat Islam yang berjuang melalui jalur parlemen (menggunakan demokrasi sebagai sarana penegakan syariat Islam) juga didukung oleh umat Islam yang tidak mendukung demokrasi yang argumentasi bahwa sistem demokrasi adalah sistem sekuler. Secara simbolik, teks ini mendukung fatwa haram Golput karena mengajak pembaca untuk tidak mempertentangkan cara penegakan syariat dan mendukung mereka yang berjuang menegakkan syariat melalui parlemen.

Teks pemberitaan lain yang menegaskan bahwa penegakan syariat melalui parlemen perlu didukung adalah *Golput Skenario Non-Islam* dalam *Sabili* No. 20/XVI/23 April 2009/27 Rabiul Akhir 1430H (halaman 49) dan *Pilih Caleg Pro Syariat Islam* dalam *Sabili* No. 20/XVI/23 April 2009/27 Rabiul Akhir 1430H (halaman 44-47).

E.1.3. Mencitrakan Positif Calon Legislatif (caleg) Islam

Sebagaimana yang tertulis dalam beberapa teks pemberitaannya, antara lain yang

berjudul *Pilih Caleg Pro Syariat Islam* dalam *Sabili* No. 20/XVI/23 April 2009/27 Rabiul Akhir 1430H (halaman 44-47), para caleg Islam diharuskan menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan syariat Islam di parlemen. *Sabili* berusaha meyakinkan pembacanya bahwa masih ada caleg yang layak untuk dipilih, jadi tidak seperti istilah beli kucing dalam karung.

E. 2. Interpretasi (*Processing Analysis*)

Sabili merupakan media yang berbasis industri dengan pengelolaan yang profesional dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Sebagaimana yang dikemukakan pada subbab sebelumnya, bahwa apabila ditinjau dari segi modal ekonomi (modal materi yang kuat), modal sosial (jaringan gerakan Tarbiyah, PKS), modal kultural (sumberdaya redaksi, pengetahuan, pengalaman), modal simbolik (kekuasaan simbolik sebagai media yang besar) dan *habitus* yang mereka miliki untuk berkontestasi dalam ranah wacana Golput pasca fatwa MUI mereka cukup kuat, terlebih wacana yang dikonstruksi dalam teks pemberitaannya adalah wacana yang mendukung wacana dominan (*orthodoxa*).

Salah satu fakta menarik yang ditemukan oleh penulis adalah bahwa meskipun teks pemberitaan yang ada di *Sabili* terutama menjelang pemilu legislatif bersifat konstruktif dan mengajak umat Islam untuk berpartisipasi dalam

pemilu (tidak Golput), namun ada pula awak redaksi yang mengaku Golput, termasuk Herry Nurdi sebagai pemimpin redaksi.

Herry mengakui bahwa dirinya Golput atas alasan ideologis, bahwa sesungguhnya syariat Islam yang akan diperjuangkan untuk diformalkan secara konstitusi oleh para calon legislatif itu sesungguhnya agak janggal. Karena syariat yang diperjuangkan itu sesungguhnya sudah sah dengan sendirinya dan sudah di sah-kan oleh Allah, tidak harus menunggu persetujuan manusia sebagai legislator. Karena hukum Allah (syariat) itu sudah mencakup segala bidang kehidupan manusia sampai pada hal-hal yang kecil, tidak perlu disahkan lagi dengan persetujuan manusia.

Ketika penulis mengkonfirmasi mengenai ketidaksesuaian konstruksi wacana yang dibangun oleh *Sabili* melalui teks pemberitaannya dengan sikap politik awak redaksi, Herry Nurdi mengatakan bahwa *Sabili* sebisa mungkin harus dapat mencakup aspirasi seluruh umat Islam. Sehingga keputusan yang diambil adalah "jalan tengah", dengan pertimbangan mayoritas pembaca *Sabili* adalah orang-orang PKS dan *Sabili* berusaha memberikan pendidikan politik bagi pembacanya. Karena tantangan terbesarnya adalah bagaimana menerapkan syariat di negara yang tidak mengakomodasi syariat. Untuk itu lebih baik bersikap jangan mematikan harapan, karena masih

banyak orang baik yang masih mau memperjuangkan syariat Islam, meskipun banyak juga yang tidak baik.¹⁷

Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa *Sabili* tetap meneguhkan posisinya sebagai media Islam yang berbasis industri, dan berusaha memenuhi kebutuhan pangsa pasarnya yakni basis pembaca yang sebagian besar berafiliasi dengan PKS. Sehingga meskipun ada perbedaan sikap politik antara awak redaksi yang Golput dengan teks pemberitaan yang menganjurkan untuk tidak Golput, perbedaan itu diakomodasi dengan "jalan tengah" supaya dapat mencakup aspirasi umat Islam yang lebih luas sehingga informasi yang di sampaikan melalui teks pemberitaan bisa mengakomodasi banyak kelompok Islam, baik yang menyetujui fatwa haram Golput, maupun yang tidak menyetujui fatwa haram Golput.

Sabili sendiri memandang demokrasi tidak haram dan tidak ada masalah dalam artian sebagai sarana akomodasi penegakan syariat Islam dan sebagai wacana politik, namun apabila demokrasi dijadikan sebagai sumber hukum yang utama *Sabili* secara tegas menolaknya. Karena sumber hukum yang utama adalah syariat dan tidak perlu disahkan lagi oleh lembaga

¹⁷ Wawancara dengan Herry Nurdi (Pemimpin Redaksi *Sabili*) Minggu 27 Desember 2009 di Masjid UGM Yogyakarta Jam 12.30 WIB

legislatif.¹⁸ *Sabili* mendukung cara penegakan syariat Islam melalui jalur politik praktis sejauh tidak membawa mudharat dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam, sebagaimana yang dikonstruksi dalam teks pemberitaanya.

Dengan demikian, praktik kewacanaan *Sabili* didukung oleh *habitus* media yang berdakwah, dalam artian *Sabili* memang dirancang sebagai suatu bentuk industri media yang dikelola secara profesional sehingga dalam mengkonstruksi wacana melalui teks pemberitaan sangat memperhatikan kebutuhan pembacanya (kepentingan konsumen) dengan tidak meninggalkan kepentingan dakwah Islam. *Habitus* tersebut didukung dengan modal-modal yang dimiliki *Sabili* dan kemudian menghasilkan praktik kewacanaan dengan mengkonstruksi wacana dalam teks pemberitaan yang memiliki kecenderungan untuk mendukung fatwa haram Golput.

E.3. Eksplanasi (*Social Analysis*)

Secara situasional, jelas wacana yang dilontarkan oleh *Sabili* merupakan respon dari wacana yang berkembang dalam suatu masyarakat dan waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan wacana Golput pasca fatwa MUI, *Sabili* merespon fatwa tersebut dengan mengkonstruksi wacana dalam teks pemberitaannya dan tentu saja

konstruksi wacana dalam *Sabili* sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh *Sabili* pula. Wacana fatwa haram Golput dari MUI menjelang pemilu yang direspon oleh *Sabili* sudah tentu mengandung kepentingan tertentu. Hal tersebut bisa dilihat pada level institusional dari analisis eksplanasi berikut.

Secara institusional, kedekatan *Sabili* dengan PKS mengakibatkan konstruksi wacana dalam *Sabili* juga cenderung menguntungkan bagi PKS. Selain itu berkenaan dengan ekonomi-politik media, *Sabili* mempertimbangkan supaya pembacanya mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena sebagian besar pembacanya adalah orang-orang PKS, maka pemberitaan yang dimunculkan pun cenderung mendukung PKS. Terkait dengan iklan sebagai basis pemasukan utama media, menjelang Pemilu 2009 dalam *Sabili* iklan partai politik pun hanya memuat iklan PKS. Sehingga kedekatan dengan PKS menjadikan *Sabili* cenderung sebagai media partisan yang mendukung salah satu kelompok dalam menghadapi Pemilu 2009.

Sedangkan secara *societal*, konstruksi wacana yang dilakukan oleh *Sabili* tidak terlepas dari situasi makro yang melingkupinya. Bahwa Indonesia adalah Negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, namun system pemerintahan negaranya menggunakan sistem demokrasi yang sekuler. *Sabili* masih toleran dengan sistem ini sepanjang tidak menjadikan demokrasi sebagai sumber hukum

¹⁸ Wawancara dengan Herry Nurdi (Pemimpin Redaksi *Sabili*) Minggu 27 Desember 2009 di Masjid UGM Yogyakarta Jam 12.30 WIB

utama dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana bagi umat Islam untuk merebut kekuasaan secara legal sekaligus bisa memperjuangkan formalisasi syariat Islam.

F. Praktik Kewacaanaan *Risalah Mujahidin* dalam Ranah Wacana Golput pasca Fatwa MUI

F. 1. Deskripsi (analisis teks)

Sebagaimana yang terungkap dalam hasil analisis teks, *Risalah Mujahidin* sangat tegas menolak fatwa haram Golput dikarenakan MUI memfatwakan Golput itu hukumnya haram. Padahal persoalan memilih atau tidak memilih dalam pemilu itu sendiri sudah diatur dalam UU pemilu, bahwa setiap warga negara yang berhak memilih dibebaskan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak.¹⁹

Dengan kombinasi *habitus* dan modal-modal yang dimiliki, *Risalah Mujahidin* menyuarakan wacana *hetero-doxa*-nya untuk menentang wacana dominan yang dikeluarkan oleh MUI bahwa Golput itu hukumnya haram (*doxa*) dan wacana-wacana lain yang mendukungnya (*ortho-doxa*). Modal yang dimiliki oleh *Risalah Mujahidin* memang tidak seberapa dibandingkan modal yang dimiliki oleh *Sabili*.

Konstruksi wacana yang dibangun dalam *Risalah Mujahidin*,

sebagaimana yang dikemukakan pada analisis teks adalah dengan mendasarkan wacana tersebut kepada dalil-dalil yang lebih sah dan mengkoreksi fatwa tersebut. Sebagaimana teks pemberitaan dalam *Risalah Mujahidin*, bentuk penolakan terhadap fatwa tersebut adalah sebagai berikut.

F.1.1. Mempertanyakan otoritas MUI untuk memfatwakan Golput

Risalah Mujahidin berpendapat bahwa seharusnya MUI menjadi pengarah bagi umat Muslim di Indonesia sekaligus pengarah bagi para pemimpin maupun elit politik. Dengan adanya fatwa haram Golput, membuktikan bahwa MUI telah salah berposisi dan lebih memihak para elit politik yang oportunistis dan menjual syariat Islam. Hal ini tersurat dalam teks pemberitaan yang berjudul *Fatwa Haram Mengakali Golput* yang dimuat dalam *Risalah Mujahidin* Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman 12-13).

Tulisan ini mengetengahkan pendapat bahwa fatwa haram Golput yang digulirkan oleh MUI telah menuai kontroversi di kalangan umat Islam karena mengandung implikasi Syariah yang menyesatkan dengan justifikasi dari dalil Al Quran :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah

¹⁹ *Risalah Mujahidin* TH.III/Edisi 29 Rajab 1430H/Juni-Juli 2009M. Hal 6

(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” (QS. Annisa:59).

Teks pemberitaan ini menegaskan bahwa ayat yang digunakan sebagai pembenaran fatwa haram Golput tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan perintah untuk memilih orang yang mengkampanyekan diri untuk menjadi pemimpin. Juga bukan untuk mentaati setiap penguasa yang dianalogikan sebagai ulil amri (hal 12). Selain itu, MUI yang menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk memfatwakan wajib memilih dan haram Golput merupakan distorsi syariah yang kurang tepat (hal 13).

Teks pemberitaan ini juga menegaskan bahwa memilih untuk tidak memilih (Golput) adalah hak, bisa karena alasan ideologis, politis-pragmatis dan administrasi. MUI dinilai telah melakukan pembelaan fatwanya dengan menggunakan kaedah ushul fikih: *“ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib”* yang artinya bila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena suatu hal, maka suatu hal itu juga menjadi wajib (hal 13).

Teks pemberitaan ini menilai bahwa fatwa haram Golput, pembenaran-pembenarannya merupakan rekayasa MUI untuk mengatasi tingginya angka Golput dan secara substansial, fatwa ini dinilai dapat menyesatkan. Dengan demikian, berbeda dengan teks-teks pemberitaan yang dilontarkan oleh

Sabili yang bernada mendukung fatwa haram Golput, teks pemberitaan ini secara tegas menyatakan menolak fatwa haram Golput.

Teks lain yang menyatakan bahwa *Risalah Mujahidin* mempertanyakan otoritas MUI untuk memfatwakan Golput adalah *MUI Mengobral Fatwa Politik Golongan Putih* dalam *Risalah Mujahidin* Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman 18-22).

F.1.2. Menolak Dalil Pembenaran yang Digunakan untuk Melegitimasi Fatwa

Dalil pembenaran yang digunakan untuk melegitimasi fatwa haram Golput adalah QS An Nisa: 59 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”

Menurut pandangan *Risalah Mujahidin*, dalil tersebut tidak tepat digunakan untuk membuat fatwa haram itu menjadi perlu. Ayat ini sering dimanipulasi untuk melegitimasi dukungan umat Islam terhadap rezim yang berkuasa, bahkan sejak orde baru dan ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan memilih pemimpin. Dalam urusan yang bersifat naluriah (kepemimpinan) pada dasarnya hukumnya mubah. Tidak ada ayat

Al-Qur'an yang memerintahkan apalagi mewajibkan untuk memilih pemimpin. Islam hanya mengatur bahwa kaum Muslimin tidak boleh dipimpin kecuali oleh sesama Muslim. Hal ini tersurat dalam teks pemberitaan yang berjudul *Fatwa Haram Mengakali Golput* yang dimuat dalam *Risalah Mujahidin* Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman 12-13), *Bisakah Fatwa Haram Hentikan Golput* dalam *Risalah Mujahidin* Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman 14-19), dan *Golput Haram, Haram Tidak Golput* dalam *Risalah Mujahidin* Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman 23-28).

F.1.3. MUI Diduga Mendapat Tekanan dari Para Elit dan Politisi

Risalah Mujahidin menilai MUI sarat dengan kepentingan-kepentingan, sebagaimana yang tersurat dalam *MUI Mengobral Fatwa Politik Golongan Putih* dalam *Risalah Mujahidin* Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman 18-22). Teks pemberitaan ini berusaha memberikan gambaran mengenai bagaimana seharusnya lembaga MUI itu bekerja. Teks pemberitaan ini menilai bahwa MUI tidak selayaknya berpihak pada pemerintah yang menolak syariat Islam dan hanya memanfaatkan legitimitas MUI untuk tujuan yang oportunistik.

Teks pemberitaan tersebut menyatakan bahwa MUI seharusnya menjalankan peranannya sebagai pewaris tugas Nabi (Warasatul Anbiya), pemberi fatwa (mufti), pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah), gerakan ishlah wa tajdid dan penegak amar ma'ruf nahi munkar. Namun ketika MUI memposisikan diri sebagai bagian dari eksekutif (pemerintah) yang menolak syariat Islam, maka produk fatwanya menjadi kehilangan wibawa dan tidak membawa misi pewaris tugas-tugas kenabian.

Teks lain yang menunjukkan bahwa MUI mendapat tekanan dari elit dan politisi untuk memfatwakan Golput adalah *Golput Haram, Haram Tidak Golput* dalam *Risalah Mujahidin* Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman 23-28), *Fatwa Haram Mengakali Golput* yang dimuat dalam *Risalah Mujahidin* Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman 12-13) dan *Bisakah Fatwa Haram Hentikan Golput* dalam *Risalah Mujahidin* Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman 14-19).

Majelis Mujahidin sebagai organisasi induk dari *Risalah Mujahidin* juga menduga bahwa MUI mendapat tekanan dari para elit dan politisi, dan dugaan tersebut terbukti ketika diadakan acara Debat Kontroversi Golput Haram yang disiarkan oleh TV One disiarkan pada tanggal 28 Januari

2009. Ketika acara debat usai, pihak MUI mengakui bahwa memang MUI mengalami tekanan dari berbagai pihak terutama elit dan politisi untuk memfatwakan haram Golput. Namun pengakuan dari pihak MUI ini tidak disiarkan oleh TV One.²⁰

Meskipun tidak menyetujui adanya fatwa haram Golput, *Risalah Mujahidin* tidak secara langsung bermaksud mengajak pembacanya untuk Golput. Namun konstruksi wacana yang dibangun oleh *Risalah Mujahidin* cenderung mengajak secara “halus” pembacanya untuk merenungkan kembali keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu.

F.2. Interpretasi (Procesing Analysis)

Sebagaimana modal-modal dan *habitus* yang dimilikinya, *Risalah Mujahidin* dapat disebut sebagai “Media Perjuangan” bagi Majelis Mujahidin untuk mensosialisasikan ide-ide tentang penegakan syariat Islam. Sebagai media perjuangan, *Risalah Mujahidin* kurang didukung oleh profesionalisme dalam usaha penerbitan media sehingga seringkali menemui kendala, terutama kendala finansial.

Terutama berkaitan dengan modal kulturalnya sebagai media komunitas yang cenderung tergolong fundamentalis radikal dan modal simbolik berupa

kekuasaan simbolik yang cenderung hanya berlaku di kalangan Majelis Mujahidin dan *habitus* sebagai media perjuangan membuat *Risalah Mujahidin* mengkonstruksi wacana yang menolak fatwa haram Golput dari MUI. Alasan utamanya adalah secara kaidah fiqh, fatwa tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan fatwa dirilis hanya merupakan kepentingan politisi yang ingin mendapatkan dukungan suara dari umat Islam, terutama partai-partai Islam.

Semangat idealisme yang tercermin dalam motto-nya, “Berterus Terang dengan Kebenaran” menjadikan *Risalah Mujahidin* lebih independen terhadap keberpihakan terhadap partai politik tertentu. Karena *Risalah Mujahidin* tidak hanya sering mengkritisi situasi politik Indonesia secara umum, tetapi juga seringkali mengkritik partai-partai yang “menjual” isu syariah demi meraih dukungan suara.

Sebagian besar anggota Majelis Mujahidin pada umumnya dan awak redaksi *Risalah Mujahidin* pada khususnya mengakui bahwa dalam pemilu 2009 lalu bersikap Golput, dan mengenai pilihan pembaca dikembalikan kepada pembaca. *Risalah Mujahidin* tidak secara langsung mengajak kepada pembacanya untuk bersikap Golput. Namun berdasarkan analisis teks, konstruksi teks pemberitaannya cenderung mengarahkan pembaca untuk bersikap Golput.

F. 3. Eksplanasi (Social Analysis)

Konstruksi wacana dalam teks pemberitaan di *Risalah Mujahidin* juga tidak terlepas dari

²⁰ Wawancara dengan Shabarrin Syakur (Pemimpin Redaksi *Risalah Mujahidin*) di Markaz Majelis Mujahidin Yogyakarta Selasa 22 Desember 2009 Jam 14.00 WIB

aspek situasional, institusional dan societal sebagai aspek diluar media yang mempengaruhi isi media.

Sebagaimana *Sabili*, secara situasional, konstruksi wacana yang dimunculkan dalam konteks fatwa haram Golput merupakan respon dari hadirnya fatwa haram tersebut sebagai *doxa* dan karena berkaitan dengan Islam, *Risalah Mujahidin* juga melakukan *positioning* dalam menghadapi *doxa* tersebut. Berbeda dengan *Sabili* yang berposisi sebagai *orthodoxa*, berdasarkan analisis teks, *Risalah Mujahidin* mengambil posisi sebagai *heterodoxa* atau penentang *doxa* sebagai wacana dominan dan berusaha menggugatnya.

Pada aspek institusional, *Risalah Mujahidin* tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan Majelis Mujahidin, karena *Risalah Mujahidin* sendiri merupakan media komunikasi dan sosialisasi bagi Majelis Mujahidin untuk memperjuangkan penegakan syariat Islam. Bahkan petinggi-petinggi Majelis Mujahidin seperti Irfan S Awwas dan Shabarrin Syakur (Ketua dan Sekretaris Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin) merangkap jabatan sebagai awak redaksi di *Risalah Mujahidin* sebagai pemimpin umum dan pemimpin redaksi. Hal tersebut menyebabkan segala macam konstruksi wacana dalam teks pemberitaan tidak akan lepas dari kontrol Majelis Mujahidin.

Sedangkan pada aspek societal, yakni aspek makro yang mempengaruhi isi media, *Risalah Mujahidin* menilai bahwa Indonesia

yang menganut sistem demokrasi sekuler tidak ada masalah selama demokrasi itu tidak dijadikan sebagai sumber hukum utama, karena sumber hukum utama adalah syariat Islam. Berkaitan dengan wacana Golput, munculnya fatwa haram Golput karena adanya kecenderungan meningkatnya angka Golput di kalangan masyarakat dan itu dapat membahayakan legitimitas pemerintah yang berkuasa. Meningkatnya angka Golput disebabkan karena sikap apatisme masyarakat terhadap politisi dan partai politik akibat ketidakmampuan para politisi dalam mengelola pemerintahan selama ini. Kemudian untuk mengatasinya dirilislah fatwa haram Golput yang menurut penilaian *Risalah Mujahidin* merupakan fatwa yang menyesatkan karena fatwa ini merupakan "pesanan" dari para politisi dan dalil yang digunakan untuk membenarkan fatwa inipun tidak tepat.

G. Kesimpulan

Dalam pertarungan wacana, sudah tentu ada kekuatan-kekuatan yang ada dibelakang wacana. Penulis melihat aktor-aktor tersebut adalah MUI sebagai pemicu munculnya wacana haram Golput melalui Fatwanya, kemudian PKS sebagai Partai Politik yang berasaskan Islam melalui kadernya yang ketika itu juga menjabat sebagai ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan sekaligus PKS ini

memiliki kedekatan secara genealogis dengan *Sabili* sehingga PKS juga memanfaatkan *Sabili* sebagai sarana untuk berpromosi. Dan aktor yang terakhir adalah Majelis Mujahidin sebagai organisasi massa Islam yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam secara *Kaffah* atau menyeluruh dalam setiap bidang kehidupan manusia. Majelis Mujahidin ini juga sekaligus sebagai sumber rujukan utama dalam menentukan pemberitaan pada *Risalah Mujahidin*.

Usaha PKS dalam memanfaatkan *Sabili* sebagai sarana promosi dapat dipandang sebagai salah satu cara melakukan konsolidasi agar tetap pembaca *Sabili* yang mayoritas adalah konstituen PKS tetap menyalurkan aspirasi dan suaranya kepada PKS dalam pemilu 2009. Kalaupun *Sabili* memiliki pembaca non-konstituen PKS, atau bahkan yang anti demokrasi pun senantiasa diajak oleh *Sabili* melalui teks pemberitaannya agar menyalurkan aspirasinya melalui partai politik.

Dengan pemasangan iklan PKS dan berbagai pemberitaan yang mendukung fatwa haram Golput (baca: mendukung parpol Islam=PKS) sudah tentu PKS ingin meraup suara dari golongan pembaca baik yang sudah menjadi konstituen maupun yang belum menjadi konstituen. Walaupun PKS adalah partai yang berasaskan Islam, namun dia tetaplah partai politik yang bertugas sebagai mesin pengumpul suara dari rakyat.

Dengan tujuan tersebut, berbagai cara pun dilalui agar dapat

mewujudkan peningkatan jumlah suara di tengah maraknya isu Golput, antara lain dengan melonggarkan ideologi partai dengan mencitrakan diri sebagai partai yang terbuka pada menjelang pemilu 2009, sehingga PKS tercipta sebagai partai yang bersih dan terbuka bagi semua golongan masyarakat dan tidak ada alasan untuk tidak memilih karena tidak ada partai atau kandidat yang layak dipilih.

Apabila hanya mengandalkan perolehan suara dari konstituen yang sudah ada, niscaya tidak akan terjadi peningkatan jumlah suara yang signifikan. Untuk itu PKS mencoba lebih terbuka bagi semua golongan agar dapat memperoleh tambahan suara dari luar konstituen lamanya.

Semakin banyak suara yang masuk ke suatu partai, maka akan semakin besar peluang partai tersebut mendudukkan kadernya di kursi legislatif. Apabila partai tersebut mampu meminta sekaligus mengikat komitmen kader yang terpilih jadi anggota legislatif untuk menyisihkan gaji atau tunjangan selama menjabat untuk kepentingan partai pengusungnya, maka partai akan mendapatkan penghasilan dan semakin banyak kader duduk di legislatif maka semakin banyak pula penghasilan dan keuntungan finansial partai.

Oleh karena itulah para kader partai politik (terutama partai Islam) menyatakan dukungannya kepada fatwa haram Golput dari MUI, agar umat Islam sebagai penduduk terbesar di Indonesia menyalurkan hak pilihnya yang

pada akhirnya berujung pada keuntungan partai politik dalam menempatkan kader-kadernya dalam lembaga legislatif, memperoleh keuntungan finansial dari anggota legislatif tersebut dan cenderung mengesampingkan tujuan utama dibentuknya partai Islam, yakni menegakkan syariat Islam.²¹

Hal tersebut juga menjadi alasan bagi *Risalah Mujahidin* dalam menolak fatwa haram Golput. Dalam pandangan mereka, Partai Islam tidak ada bedanya dengan partai sekuler dalam hal perebutan kekuasaan. Karena orientasi kekuasaan yang sama tersebut, partai-partai Islam cenderung melakukan pembenaran atas penyalahgunaan dalil agama sebagaimana yang terjadi dalam wacana Golput haram pasca fatwa MUI.

Majelis Mujahidin sebagai organisasi yang menaungi *Risalah Mujahidin* tidak sepenuhnya mengakui bahwa kinerja partai politik merupakan kinerja penegakan syariat Islam. Mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa partai Islam dapat memenuhi tuntutan penegakan syariat Islam.

²¹ Hal ini dapat terbukti dari sikap politik partai Islam pasca pemilu legislatif, yang mana partai-partai yang mayoritas berkonstituen Islam seperti PKB, PKS, PPP, PAN cenderung memilih untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Padahal apabila partai-partai tersebut bersatu dan berkoalisi (sebagaimana koalisi Poros Tengah pada Pemilu 1999), maka mereka sudah dapat mengajukan calon presiden sendiri. Namun demi posisi “aman”, maka mereka lebih memilih untuk bergabung dengan *incumbent*.

Oleh karena itu, dalam pemberitaannya, *Risalah Mujahidin* cenderung mengkritisi partai Islam yang memanfaatkan agama sebagai sarana untuk meraih suara dari masyarakat Islam yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan wacana Golput, sebagaimana yang terungkap dalam analisis teks, bahwa *Risalah Mujahidin* mengkritik Fatwa Haram Golput bahwa fatwa tersebut tidak ada kaitannya dengan Islam. Mewajibkan umat Islam untuk ikut memilih dengan kriteria-kriteria tertentu (terlebih untuk tujuan kemenangan partai Islam) hanya merupakan bentuk mobilisasi umat Islam agar mau menggunakan hak pilih kepada partai Islam. Karena fatwa tersebut menggunakan domain Islam, maka sudah tentu partai Islam boleh saja berharap banyak untuk dapat memperoleh peningkatan jumlah suara pasca rilisnya fatwa ini.

Sebagaimana yang telah diungkapkan di bab IV, *Risalah Mujahidin* adalah media yang cenderung menjadi corong bagi organisasi Majelis Mujahidin, sebuah organisasi massa yang bertujuan menegakkan syariat Islam secara *kaffah* dan menyeluruh pada setiap bidang kehidupan manusia. Namun dalam kasus wacana Golput, pemberitaan *Risalah Mujahidin* cenderung ingin memisahkan antara wilayah politik dengan wilayah agama, dengan alasan bahwa fatwa haram Golput yang dirumuskan merupakan “pesanan” dari elit-elit politik yang

ingin memanfaatkan besarnya potensi suara yang dapat diraih dari umat Islam di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orientasi *Sabili* dan *Risalah Mujahidin* dalam menyikapi fatwa haram Golput juga dipengaruhi pertama oleh faktor kedekatan dengan partai politik tertentu, kedua orientasi media sebagai media industri atau media komunitas dan ketiga faktor ideologis yang mendasari kelompok di belakang *Sabili* dan *Risalah Mujahidin* terutama pandangan mengenai politik praktis, bahwa

Sabili mendukung upaya penegakan syariat Islam melalui jalur parlemen, sedangkan *Risalah Mujahidin* tidak mendukung upaya penegakan syariat Islam melalui jalur politik praktis.

Kedua media tersebut sama-sama media Islam yang cenderung anti-pluralis, namun perbedaan yang mendasar adalah bahwa *Sabili* berposisi sebagai media industri dan pro PKS, sedangkan *Risalah Mujahidin* adalah media komunitas dan cenderung anti PKS. Secara umum, temuan penelitian ini dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4: Hasil Penelitian

SABILI	RISALAH MUJAHIDIN
Media Industri	Media Komunitas
Dekat dengan partai politik (PKS)	Cenderung anti partai politik
Mendukung penegakan syariat Islam melalui jalur parlemen	Tidak mendukung upaya penegakan syariat melalui parlemen
Mempertimbangkan setiap berita (teks) yang akan diturunkan, apakah akan menyinggung kelompok pembaca terbesar (PKS) atau tidak	Setiap berita (teks) yang diturunkan merupakan kajian suatu fenomena atau fakta secara syar'i
Berusaha mencakup semua kelompok Islam	Cenderung terbatas hanya pada kalangan Mujahidin
Anti pluralisme agama	
Berjuang menegakkan formalisasi syariat Islam	

Daftar Pustaka

Abdurrassaq dkk, (1989) *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Cipta Adipustaka

Adian, Donny Gahril (2002) *Menabur Kuasa Menuai Wacana*,

artikel dalam majalah Basis No. 01-02, Tahun ke-51, Januari-Februari 2002

Ahmad, Munawar (2008) *Membaca Gerakan Golput dalam Pemilu 2009*, Jurnal Dialog Kebijakan Publik Edisi 4/Desember/Tahun II/2008

- Asfar, Muhammad (2004) *Presiden Golput*, Surabaya: Jawa Pos Press
- Awwas, Irfan S (2009) *Fatwa Haram Mengakali Golput*. Risalah Mujahidin Th III Edisi 27 Rabiul Awwal 1430H/Februari-Maret 2009M.
- Bourdieu, Pierre (1995) *Outline of Theory of Practice*, Cambridge: Cambridge University Press
- Burton, Graeme (2008) *Yang Tersembunyi Dibalik Media*, Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra
- Devereux, Eoin (2007) *Media Studies*, London: Sage Publications Ltd.
- Durham, Meenakshi Gigi (ed) (2006) *Media and Cultrual Studies Keywords*, Malden: Blackwell Publishing Ltd.
- Eriyanto (2008) *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS
- Eriyanto (2009) *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS
- Fairclough, Norman (1995) *Media Discourse*, New York: St. Martin Press
- Fairclough, Norman (2003) *Language and Power*, Malang: Boyan Publishing
- Fashri, Fauzi (2007) *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Juxtapose
- Gumay, Hadar Navis (2008) *Tekan Golput, Pemilih Harus Dipermudah*, Media Indonesia vol 5:2 Senin 4 Agustus 2008
- Hall, Stuart (1997) *Representation: Cultural Representation and Signifying Process*, London: Sage Publications
- Hamad, Ibnu (2004) *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Jakarta: Granit
- Hamad, Ibnu (2009) *Perkembangan Analisis Wacana Dalam Ilmu Komunikasi, Sebuah Telaah Ringkas*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Hardiman, F. Budi (1993) *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius.
- Haryatmoko (2003) *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa*, Majalah Basis No. 11-12 Tahun ke-52, November-Desember 2003
- Irawanto, Budi (2006) *Transformasi Pers Islam di Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 9, No. 3, Maret 2006.
- Jenkins, Richard, (2004). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Jorgensen, Marriane, dan Phillips, Louise J., (2007) *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Marijan, Kacung (2008) *Golput dalam Pilkada: Mengapa Meninggi?*, Jurnal Dialog Kebijakan Publik Edisi 4/Desember/Tahun II/2008

Marjono, Riki (2009) *Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia: Sudi Komparatif Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Muhammad, Agus (2001) *Jihad Lewat Tulisan*, Jurnal Pantau, Tahun II No.15/ Juli 2001

Muhammad, Agus (2005) *Quo Vadis Media Islam Moderat*, <http://islamlib.com/id/artikel/quo-vadis-media-islam-moderat/> diakses tanggal 14 Maret 2009 jam 10:33 WIB

Muntoha (2009) *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Haram "Golput" dalam "Timbangan Hukum Islam dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif*, makalah disampaikan pada Seminar Urgensi Memperkuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia, University Club UGM Yogyakarta tanggal 14 Mei 2009.

Pardini, Agung (2005) *Majalah Sabili: Media Revivalis Gerakan Tarbiyah (1988-1993)*, <http://www.scribd.com/doc/15912915/Majalah-Sabili-Media-Revivalis-Sejarah>. Diakses 13 Desember 2009

Rijal, Syamsul (2005) *Media and Islamism in Post-New Order Indonesia: The Case of Sabili*, Jurnal Studia Islamika Vol. 12 No. 3

LAMPIRAN

CONTOH TABEL ANALISIS TEKS

Tidak semua tabel analisis teks ditampilkan disini karena keterbatasan tempat. Penambahan lampiran dimaksudkan untuk menampilkan cara kerja peneliti dalam melakukan analisis teks.

1. Analisis Teks "*Strategi Kaum Khuffar untuk Menguasai Pemilu 2009*"

Sabili No. 20/XVI/23 April 2009/27 Rabiul Akhir 1430H (halaman 30-35)

Unsur Pembentuk Teks	Bukti		
	Alat Pembuktian	Bukti dalam teks	Makna
Perlakuan atas peristiwa	Tema yang diangkat	Waspada terhadap skenario kaum <i>Khuffar</i> yang ingin menguasai Pemilu 2009 dan menyingkirkan	Umat Islam harus waspada terhadap kaum non-Islam, sebab apabila umat Islam lengah, mereka bisa

		umat Islam secara halus, salah satunya adalah dengan isu Golput.	menguasai posisi strategis dalam struktur.
Sumber yang dikutip	Nama dan atribut sosial sumber	Denny Tewu (PDS) Ruyandi Hutasoit(PDS) Cholil Ridwan (MUI) Ma'ruf Amin (MUI)	Argumen dari tokoh PDS digunakan untuk memposisikan kaum non-Islam sebagai ancaman bagi umat Islam. Dan untuk mengatasi hal tersebut, argumen dari tokoh MUI digunakan untuk mengimbau bahwa umat Islam jangan sampai Golput, sekaligus mempertegas perlunya fatwa haram Golput.
Cara penyajian	Pilihan fakta yang dimuat	Komposisi yang tidak seimbang dalam parlemen antara muslim-non muslim dan tidak proporsional. Kepala daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah terpilih yang non-muslim	Umat Islam ditekankan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, agar umat Islam dapat menguasai parlemen dan menegaskan bahwa Golput hanya akan menguntungkan pihak non Islam.
	Struktur penyajian	Menempatkan bahwa kaum non Islam adalah pihak yang diuntungkan apabila umat Islam tidak berpartisipasi (Golput) dalam Pemilu 2009.	Fatwa haram Golput diperlukan agar umat Islam aktif dan berpartisipasi dalam Pemilu 2009 supaya tidak menguntungkan

			kaum non Islam.
Simbol-simbol yang digunakan	Verbal : kata, istilah, frase	<ul style="list-style-type: none"> - Skenario “licik” kaum kuffar... - Umat Islam bisa “sengsara” ... 	Umat Islam harus waspada dan harus melawan strategi dengan strategi supaya tidak merugikan kepentingan umat Islam dan terbebas dari kerugian. Penggunaan istilah “licik” dan “sengsara” adalah upaya untuk meyakinkan pembaca agar menegaskan posisi umat Islam ada dalam ancaman dan bahaya.
	Non-verbal: foto, gambar	Foto interior gedung DPR yang kosong, Foto kerumunan massa PDS, Foto Caleg PDS yang berjilbab.	Lembaga parlemen atau DPR jangan sampai diisi oleh kaum kuffar yang berjumlah banyak.
Kesimpulan	Teks ini menekankan bahwa Non muslim atau kaum kuffar adalah kaum yang paling diuntungkan apabila umat Islam tidak menggunakan hak pilih (Golput) dalam Pemilu. Jumlah kaum kuffar ini banyak dan mereka mempunyai skenario untuk menyingkirkan umat Islam. Untuk itu, teks ini mengajak umat Islam untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Dengan demikian, teks ini menyatakan dukungannya terhadap fatwa haram Golput.		

2. Analisis “Teks Golput Haram, Haram tidak Golput”

Unsur Pembentuk Teks	Bukti		
	Alat Pembuktian	Bukti dalam teks	Makna
Perlakuan atas peristiwa	Tema yang diangkat	Wajib memilih dan mengharamkan Golput dengan alasan mudharatnya lebih besar sama sekali tidak didasarkan pada dalil syara', hanya hawa nafsu belaka. Fatwa haram Golput MUI adalah sesat dan menyesatkan.	Fatwa haram Golput tidak seharusnya dikeluarkan oleh MUI
Sumber yang dikutip	Nama dan atribut sosial sumber	Tidak ada kutipan dari sumber, lebih banyak mengenai pengkajian mengenai fatwa haram Golput dengan dalil hadist Nabi / Ayat AlQuran.	Fatwa haram Golput perlu dikaji lebih lanjut terutama mengenai dalil-dalil yang digunakan untuk membenarkan.
Cara penyajian	Pilihan fakta yang dimuat	Kelompok yang mendukung fatwa haram Golput berpendapat bahwa apabila parlemen tidak dikuasai oleh Islam, maka akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu perlu ada fatwa haram Golput dengan dalil pbenarannya, yang ternyata dalil-dalil tersebut tidak	Fatwa haram golput tidak memiliki dalil yang kuat, hanya berdasar keinginan para oportunistik.

		legitim.	
	Struktur penyajian	Penjelasan secara komprehensif dalil-dalil yang digunakan untuk melegitimasi fatwa haram Golput dan kemudian mendelegitimasinya.	Dalil yang digunakan untuk melegitimasi fatwa haram Golput tidak kuat dan justru mudah dipatahkan.
Simbol-simbol yang digunakan	Verbal : kata, istilah, frase	“propaganda” Golput Haram...	Fatwa haram Golput ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu yang di sebarkan kepada umat muslim dalam bentuk yang seolah membawa manfaat, padahal membawa <i>mudharat</i> .
	Non-verbal: foto, gambar	Karikatur Hidayat Nur Wahid membawa kereta kecil bertuliskan “golput” melintasi pembatas antara wilayah agama dan wilayah politik.	Hidayat Nur Wahid adalah tokoh yang paling berperan membawa masalah politik ke wilayah agama.
Kesimpulan	Melalui teks pemberitaan ini, <i>Risalah Mujahidin</i> menilai bahwa wajib memilih dan golput haram dengan alasan <i>mudharatnya</i> lebih besar sama sekali tidak didasarka <i>syara'</i> dan hanya sekedar hawa nafsu belaka. Dengan kata lain, <i>Risalah Mujahidin</i> secara tegas menyatakan untuk menolak fatwa haram Golput. Fatwa haram golput keluaran MUI tidak ada kaitannya dengan Islam, bahkan secara syar'I fatwa tersebut menyesatkan. Adanya fatwa ini tidak akan menegakkan hukum Allah.		